

FLYPAPER EFFECT DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH

Luluk Atika Rahmawati
lu2k.atiikaa@gmail.com
Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to give empirical evidence whether General Allocation Fund and Local Own-Source Revenue have influence to the local expenditure in sub-districts/cities in East Java Province specifically at the Gerbangkertasusila areas which are i.e.: Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo and Lamongan. And to give empirical evidence whether the flypaper effect occurs in 2009-2013. The population is the area of sub-districts / cities in East Java specifically in the area of Gerbangkertasusila in 2009-2013 periods. Based on the result of test it can be found that simultaneously Local Own-Source Revenue and General Allocation Fund have significant influence to the local expenditure. The coefficient of Local Own Source Revenue is 0.703 and it is significant to the local expenditure compared to the coefficient of General Allocation Fund is 0.273. It also proves that the flypaper effect does not occur in the area with a high Local Own Source Revenue or in a low Local Own Source Revenue.

Keywords: *Flypaper Effect, General Allocation Fund (DAU), Local Own-Source Revenue, Local Expenditure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa timur khususnya pada wilayah Gerbangkertasusila yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Dan untuk memberikan bukti empiris Apakah terjadi *flypaper effect* tahun 2009 - 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur khususnya pada wilayah Gerbangkertasusila dalam periode tahun 2009 - 2013. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa PAD dan DAU secara bersama - sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Koefisien PAD sebesar 0,703 dan signifikan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan koefisien DAU sebesar 0,273 dan tidak signifikan. Ini juga membuktikan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemerintah Daerah terhadap Belanja Daerah

Kata kunci : *flypaper effect, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah.*

PENDAHULUAN

Semenjak era orde baru, orientasi pada penguasa masih sangat kuat dalam kehidupan birokrasi publik. Menurut Bintoro Tjokroaminoto (1984) menyebutkan birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh banyak orang. Dalam realitanya aktifitas birokrasi di Indonesia terkesan negatif dan menyulitkan masyarakat untuk mengaksesnya. Hak interpelasi (yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di suatu bidang) tidak pernah digunakan, dikarenakan sistem pemerintahan yang otoriter dan tertutup sehingga tidak mungkin hak ini digunakan dalam sistem politik pada masa orde baru. Birokrasi pada era orde baru bisa dikatakan masih jauh dari tingkat akuntabilitas dan transparansi, padahal kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan negara maupun

daerah. Menurut Mardiasno (2002) Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Khusaini (2006) menyatakan bahwa keputusan politik pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik birokratis ke desentralistik partisipatoris. Penerapan otonomi daerah di Indonesia, yang hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lahirnya undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat "given" dan "uniform" (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang harus mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosiokultural masyarakat setempat.

Pemberian Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan (Puspita Sari, 2010).

Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dan diperhitungkan dalam APBD. Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkan berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (1999) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper effect* (Halim, 2002).

Abdul Halim dan Sukriy (2002) melakukan pengujian adanya *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena menurut Halim (2002) pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Menanggapi hal tersebut, Maimunah (2006) melakukan penelitian yang sama pada pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Sumatra pada tahun 2003 dan 2004. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Abdul Halim dan Sukriy Abdullah (2002) yaitu DAU periode t-1 memiliki pengaruh lebih besar dari pada PAD periode t-1 terhadap Belanja Daerah t. Namun ketika diuji pengaruh DAUt dan PADt secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah t, hasilnya PAD tidak signifikan dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah Pemerintah Kota/Kabupaten wilayah Gerbangkertasusila? (2) Antara DAU dan PAD, manakah yang berpengaruh paling signifikan terhadap belanja daerah di Pemerintah Kota/Kabupaten wilayah Gerbangkertasusila? (3) Apakah terjadi *flypaper effect*

pada tahun 2009-2013? (4) Apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi atau daerah dengan PAD yang rendah?

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah (1) Untuk memberikan bukti empiris manakah yang berpengaruh paling signifikan terhadap belanja daerah di Pemerintah Kota/Kabupaten wilayah Gerbangkertasusila. (2) Untuk memberikan bukti empiris manakah yang berpengaruh paling signifikan terhadap belanja daerah antara DAU dan PAD di Pemerintah Kota/Kabupaten wilayah Gerbangkertasusila. (3) Untuk memberikan bukti empiris Apakah terjadi *flypaper effect* pada tahun 2009-2013. (4) Untuk memberikan bukti empiris apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi atau dengan PAD rendah.

TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat (Halim, 2001).

Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimayu, 2005).

Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, Pemerintah daerah perlu melakukan rekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (*bureaucracy reengineering*). Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakat. Untuk Indonesia, perkembangan manajemen dan administrasi publik memang dinilai kurang maju. Tetapi dengan adanya otonomi daerah menyebabkan muncul era baru dalam administrasi pemerintahan dan manajemen publik. Disahkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 memberikan harapan baru dalam pengembangan otonomi yang sebenarnya. Pengembangan otonomi daerah saat ini diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Mardiasno, 2002).

Desentralisasi

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut (Litvack, 1999) desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Semakin besar suatu negara (dilihat dari penduduk dan luas wilayah) maka biasanya semakin kompleks dan "heterogen" pemerintahnya, yang tercermin dari

tingkatan pemerintah daerah. Desentralisasi (dan sentralisasi) adalah cara untuk melakukan penyesuaian tata kelola pemerintah dimana dilakukan distribusi fungsi pengambilan keputusan dan kontrol.

Flypaper effect

Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants yang bersifat tidak bersyarat (*unconditional grants*) daripada pendapatan asli daerahnya sehingga akan menimbulkan pemborosan dalam belanja daerah. Istilah *Flypaper effect* dikembangkan oleh Dollyer dan Worthington (1995) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menggunakan pendapatan transfer (*grants*) untuk memperluas belanja publik daripada pendapatan daerah (lokal), baik secara langsung melalui rapat atau tidak langsung melalui pengurangan pajak. Akibatnya berkaitan dengan alasan politik dan birokratis, yaitu transfer untuk pemerintah daerah cenderung mengarah pada pengeluaran daerah lebih besar daripada pendapatan daerah (Shah 1997). Namun pada kenyataannya dana transfer ini menjadikan pemerintah daerah menjadi semakin bergabung karena dominanya dana transfer ini dalam pendapatan daerah.

Identifikasi *flypaper effect*

Asumsi penentuan terjadinya *Flypaper effect* pada penelitian ini fokus pada perbandingan pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Melo (2002) dan Venter (2007) menyatakan bahwa *Flypaper effect* terjadi apabila:

1. Pengaruh atau nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh atau respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *Flypaper effect*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18, Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Pasal 6 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Sedangkan kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (Bambang Prakorsa, 2004).

Dalam UU No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain lain yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan uraian pada landasan teori tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut :

H₁: DAU dan PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

H₂: Pengaruh DAU_t terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_t terhadap BD_t.

H_3 : Pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t

H_4 : Daerah dengan PAD rendah dan PAD tinggi mengalami *flypaper effect*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006).

Definisi dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah suatu porsi atau bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Mason dan Douglas, 1996). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah populasi tersebut. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder dengan metode sensus yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota/Kabupaten wilayah Gerbangkertasusila yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2009 hingga 2013.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Sugiyono, 2009:224). Dari masalah yang diteliti, teknik dan alat digunakan serta tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu: Data dokumenter, yaitu merupakan jenis data penelitian berupa arsip yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel berisi pernyataan tentang arti dan maksud variabel-variabel penelitian, dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian terhadap variabel yang dibahas serta memudahkan dalam penerapan data yang digunakan, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Yang dimaksudkan dengan Belanja Daerah adalah angka realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten wilayah Gerbangkertasusila pada Tahun Anggaran 2009 hingga 2013 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp). Sedangkan Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah DAU dan PAD Pemerintah Kota/Kabupaten wilayah Gerbangkertasusila pada Tahun Anggaran 2009 hingga 2013 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk dapat melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian

tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

Analisis Regresi Linier Berganda

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat hubungan pendapatan yaitu PAD dan DAU dalam mempengaruhi belanja daerah. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk melihat pengaruh jumlah DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) secara *cross-section* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1X_1 + 2X_2 + e$$

Dimana:

Y : Belanja Daerah

X₁ : DAU

X₂ : PAD

e : *Error term*

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2006), yang terdiri dari:

Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk dijumlahkan sampel kecil.

Uji Statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusikan tidak normal (Ghozali, 2006).

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolinieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $Tolerance < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2006).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan menjadi tidak layak untuk pakai (Singgih Santoso, 2000).

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 sampai $+2$, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji *Durbin Watson* (DW test).

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi gejala heteroskedastisitas digunakan uji Park, yaitu dengan menguji tingkat signifikansi.

Pengujian ini dilakukan dengan merespon variabel (x) sebagai variabel independen dengan nilai absolut *unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependen. Apabila hasil uji di atas level signikasn ($p > 0,05$), berarti tidak terdapat heterokedastisitas, apabila dibawah level signifikan ($p < 0,05$) terjadi heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur khususnya di wilayah Gerbangkertasulila yang meliputi: Gresik, Bangkalan, Mojokerto Lamongan, Sidoarjo, dan Surabaya. Data pada penelitian ini (n) sebanyak 30, data didapatkan dari laporan realisasi APBD Tahun 2009 hingga 2013 yang seluruhnya menyampaikan laporan kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009 hingga 2013, yang mencantumkan data-data mengenai PAD, DAU dan alokasi belanja daerah kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004). Berikut ini dana alokasi umum (DAU) selama tahun 2009-2013 tersaji pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Dana Alokasi Umum
Tahun 2009 - 2013
(Dalam Rupiah)

| Daerah | Tahun | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Surabaya | 765,885,671,000 | 652,532,472,000 | 679,450,127,000 | 1,061,625,528,000 | 1,160,025,693,000 |
| Sidoarjo | 666,155,936,000 | 666,336,274,000 | 758,701,153,000 | 974,570,533,000 | 1,104,580,340,000 |
| Mojokerto | 502,176,671,000 | 529,781,802,000 | 598,664,725,000 | 733,782,205,000 | 832,266,682,000 |
| Lamongan | 581,718,829,000 | 606,700,000,000 | 679,813,150,000 | 832,015,926,000 | 958,344,988,000 |
| Gresik | 511,324,320,000 | 513,481,870,000 | 561,081,899,000 | 711,868,321,000 | 804,903,511,000 |
| Bangkalan | 478,763,360,000 | 497,593,900,000 | 565,621,082,000 | 700,513,200,000 | 778,024,112,000 |
| Rata-rata | 584,337,464,500 | 577,737,719,667 | 640,555,356,000 | 835,729,285,500 | 939,690,887,667 |

Sumber Data: BPS Jawa Timur 2013

Berdasar Tabel 1 diketahui Dana Alokasi Umum (DAU) selama tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Dengan meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahun akan mampu membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) selama tahun 2009-2013 dimiliki Kota Surabaya, dimana pada tahun 2013 Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 1.160.025.693.000,- dan diikuti Kabupaten Sidoarjo yang mencapai Rp 1.104.580.340.000,- Sedang Dana Alokasi Umum (DAU) terendah dimiliki Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 778.024.112.000,- serta Kabupaten Gresik sebesar Rp 804.903.511.000,-

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan yang sah. Berikut ini penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2009-2013 tersaji pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2009 – 2013
(Dalam Rupiah)

| Daerah | Tahun | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Surabaya | 809,795,526,042 | 908,647,775,730 | 1,886,514,301,580 | 2,279,613,848,832 | 2,791,580,050,709 |
| Sidoarjo | 284,660,712,000 | 288,731,707,000 | 484,313,737,000 | 669,617,557,000 | 721,794,682,000 |
| Mojokerto | 59,625,657,000 | 62,850,231,000 | 108,709,404,000 | 167,054,638,000 | 190,236,221,000 |
| Lamongan | 71,320,244,000 | 94,066,055,000 | 99,545,629,000 | 129,284,733,000 | 124,605,655,000 |
| Gresik | 160,961,188,000 | 168,302,821,000 | 274,033,173,000 | 427,588,706,000 | 423,216,536,000 |
| Bangkalan | 34,477,143,000 | 35,355,533,000 | 65,039,401,000 | 80,253,709,000 | 83,249,441,000 |
| Rata-rata | 236,806,745,007 | 259,659,020,455 | 486,359,274,263 | 625,568,865,305 | 722,447,097,618 |

Sumber Data: BPS Jawa Timur 2013

Berdasar tabel 2 dapat diketahui selama tahun 2009-2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Begitu juga dengan Kabupaten yang lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi selama tahun 2008-2013 dimiliki Kota Surabaya dimana pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 2.791.580.050.709,- sedang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terendah dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ang diperoleh pada tahun 2013 sebesar Rp 83.249.441.000, Kabupaten Lamongan sebesar Rp 124.605.655.000, dan Kota Mojokerto sebesar Rp 190.236.221.000,-. Sehingga kabupaten tersebut ketergantungan dengan pemerintah pusat masih tinggi.

Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran daerah pada suatu periode anggaran. Jenis Belanja Daerah dikelompokkan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasional pemeliharaan, belanja pelayanan publik, belanja bantuan keuangan dan belanja lain-lain. Besarnya Belanja Daerah dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Belanja Daerah
Tahun 2009 - 2013
(Dalam Rupiah)

| Daerah | Tahun | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Surabaya | 3,127,363,165,158 | 3,637,069,260,868 | 3,753,710,413,890 | 4,299,150,223,080 | 5,057,279,664,345 |
| Sidoarjo | 1,371,659,767,000 | 1,548,893,545 | 1,828,757,388,000 | 2,238,524,286,000 | 2,581,879,644,000 |
| Mojokerto | 831,735,044,000 | 806,001,596,000 | 1,058,760,365,000 | 1,253,042,805,000 | 1,326,988,438,000 |
| Lamongan | 982,407,163,000 | 942,039,572,000 | 1,287,973,838,000 | 1,473,747,395,000 | 1,550,103,022,000 |
| Gresik | 1,009,099,863,000 | 1,043,302,834,000 | 1,272,966,419,000 | 1,451,130,801,000 | 1,810,425,747,000 |
| Bangkalan | 715,577,571,000 | 755,125,158,000 | 1,109,022,544,000 | 1,220,089,508,000 | 1,370,899,004,000 |
| rata-rata | 1,339,640,428,860 | 1,197,514,552,402 | 1,718,531,827,982 | 1,989,280,836,347 | 2,282,929,253,224 |

Sumber Data: BPS Jawa Timur 2013

Berdasar tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2009–2013 belanja daerah pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Belanja Daerah tertinggi selama tahun 2008-2013 dimiliki Kota Surabaya yang mencapai Rp 5.057.279.664.345 pada tahun 2013 sedang belanja daerah yang terendah dimiliki Kabupaten Bangkalan yang mencapai Rp 1.370.899.004.000,- pada tahun 2013 serta Kota Mojokerto yang mencapai Rp 1.326.988.438.000,-. Belanja daerah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industri, tetapi juga ditujukan untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Upaya peningkatan PAD melalui retribusi ataupun pajak harus diimbangi dengan kesungguhan pemda untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Statistik Deskriptif

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan alokasi belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2013, maka statistik deskriptif yaitu minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------------|----|--------------|---------------|---------------|----------------|
| DAU | 30 | 478763000000 | 1160030000000 | 715610433333 | 186259508499 |
| PAD | 30 | 34477143000 | 2791580000000 | 466168034766 | 683036974392 |
| Belanja Daerah | 30 | 1548893545 | 5057280000000 | 1705579196451 | 1166501672975 |

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar Rp 478,763,360,000. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum terendah di Jawa Timur diperoleh dari Kabupaten Bangkalan. Ini membuktikan Kabupaten Bangkalan dengan wilayah daerah yang tidak begitu luas bisa mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum memiliki nilai maksimum sebesar Rp 1,160,025,693,000. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum tertinggi diperoleh dari Kota Surabaya di tahun 2013. Ini membuktikan Kota Surabaya masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata (mean) selama lima tahun sebesar Rp 715,610,142,666.67.

2. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 34.477.143.000. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah terendah di Jawa Timur diperoleh dari Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu Kabupaten Bangkalan masih sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerahnya, sehingga Kabupaten Bangkalan harus meningkatkan PAD dengan menggali terus sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sendiri baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp 809,795,526,042. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Jawa Timur diperoleh dari kota Surabaya. Oleh karena itu dengan tingginya PAD Kota Surabaya memiliki kemandirian otonomi daerah lebih besar dalam membiayai pembangunan daerah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur khususnya wilayah Gerbangkertasulila. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama lima tahun sebesar Rp 466.168.034.766,-
3. Belanja daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 1.548.893.545. Hasil penelitian menunjukkan Belanja daerah terendah di Jawa Timur diperoleh dari Kabupaten Bangkalan pada tahun 2009. Ini membuktikan Kabupaten Bangkalan dengan wilayah daerah yang tidak begitu luas dan jumlah penduduknya sedikit dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat membiayai belanja langsung daerahnya dengan dana sebesar Rp 1.548.893.545.
4. Belanja Daerah memiliki nilai maximum sebesar Rp 5.057.280.000.000. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Langsung tertinggi di Jawa Timur diperoleh dari Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013. Ini membuktikan Kabupaten Sidoarjo dalam mengalokasikan sebagian besar biayanya untuk belanja langsung kegiatan pembangunan daerah. Belanja daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama lima tahun sebesar Rp 1.705.579.196.451

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan digunakan persamaan regresi linier berganda adalah untuk melakukan pendugaan atau taksiran variasi nilai suatu variabel belanja daerah yang disebabkan oleh variasi nilai suatu variabel DAU dan PAD. Dengan demikian dalam penelitian ini, fungsi dari persamaan regresi linier berganda adalah untuk melakukan pendugaan terhadap variabel belanja daerah, apabila terjadi perubahan pada DAU dan PAD yang mempengaruhi belanja daerah.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized | T | Sig. |
|-------|-----------------------------|------------------|----------------------|------|-------|
| | B | Std. Error | Coefficients Beta | | |
| 1 | (Constant) | 366689536747.197 | 367059880685.912 | .999 | .327 |
| | DAU | .947 | .557 | .151 | 1.701 |
| | PAD | 1.419 | .152 | .831 | 9.348 |

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Output SPSS

Dari tabel 5 di atas yang diperoleh melalui hasil olah data SPSS, maka terbentuk persamaan regresi dibawah ini:

$$Y = 366689536747.197 + 0,847DAU + 1,419PAD$$

Dengan persamaan regresi linier berganda yang telah didapat, maka dapat diinteprestasikan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Nilai Konstanta (a) = 366689536747.197

Nilai konstanta (α) sebesar 366689536747.197 menunjukkan bahwa apabila DAU dan PAD dalam kondisi tetap atau konstan, maka belanja daerah akan sebesar 2189103607104,733 Rupiah.

b. Nilai $\beta_1 = 0,947$

Nilai β_1 menunjukkan nilai 0,947 dan memiliki tanda koefisien positif, hal tersebut menunjukkan adanya perubahan yang searah antara DAU dengan belanja daerah yang artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pada DAU sebesar 1 Rupiah, maka belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,947 Rupiah dengan asumsi variabel PAD konstan.

c. Nilai $\beta_2 = 1,419$

Nilai β_2 menunjukkan nilai 1.419 dan memiliki tanda koefisien positif, hal tersebut menunjukkan adanya perubahan yang searah antara PAD dengan belanja daerah yang artinya bahwa apabila terjadi peningkatan pada PAD sebesar 1 Rupiah, maka belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1.419 Rupiah, dengan asumsi variabel DAU konstan

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis telah memenuhi syarat dari keempat uji asumsi klasik atau tidak. Perhitungan untuk keempat uji asumsi klasik tersebut sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data berdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Jika signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal
- 2) Jika signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 6
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Belanja daerah | DAU | PAD |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| N | | 30 | 30 | 30 |
| | Mean | 3974914000 | 863905600. | 1735228800. |
| Normal Parameters ^{a,b} | Std. Deviation | 734517307917.2 | 231891735387.0 | 862377010995.3 |
| | Absolute | .4710 | .1202 | .0710 |
| Most Extreme Differences | Positive | .218 | .264 | .231 |
| | Negative | -.130 | -.203 | -.170 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .488 | .590 | .517 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .971 | .878 | .952 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS

Nilai K-S untuk variabel belanja daerah 0,488 dengan signifikansi sebesar 0,971, nilai K-S variabel DAU 0,590 dan nilai K-S variabel PAD 0,517 dengan signifikansi sebesar 0,952. Dengan demikian data-data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Uji multikolinieritas dapat dilaksanakan menggunakan model regresi dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan V_a

riance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance value diatas 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinearitas pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas

| Model | | Coefficients ^a | |
|-------|-----|---------------------------|-------|
| | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | DAU | .609 | 1.642 |
| | PAD | .609 | 1.642 |

a. Dependent Variable: Belanja Daerah
Sumber : Output SPSS

Berdasar hasil output SPSS pada bagian *coefficient* diperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) DAU sebesar 1,642, dan PAD sebesar 1,642 dengan demikian menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai *tolerance* mendekati 1 untuk DAU sebesar 0,609, dan PAD sebesar 0,609. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin-Watson. Singgih (2002), bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2011) uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat autokorelasi antara error yang terjadi antar periode yang diujikan dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi harus dilihat nilai uji D-W.

Tabel 8
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

| Model | Durbin-Watson |
|-------|--------------------|
| 1 | 2,112 ^a |

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU
b. Dependent Variable: Belanja daerah
Sumber : Output SPSS

Nilai DW sebesar 2,112, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 30 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2). Nilai DW 2,112 lebih besar dari batas atas (du) 1,71 dan kurang dari 2,28 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak H₀ yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif (sesuai tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Pendeteksian adanya heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, yaitu dengan meregresikan variabel bebas (independen) dengan absolut residual. Jika nilai probabilitas signifikansi masing-masing variabel bebas di atas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 129). Berikut hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | Sig. | Keterangan |
|----------|-------|-----------------------------------|
| DAU | 0.246 | Tidak terjadi Heteroskedastisitas |
| PAD | 0.227 | Tidak terjadi Heteroskedastisitas |

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0.05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Dari hasil pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa regresi linier yang dihasilkan dalam penelitian ini dikatakan sudah baik, dimana hasil pengujian asumsi klasik semua data tersebut sudah memenuhinya.

Uji Kelayakan Model Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel belanja daerah. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel DAU dan PAD dalam menjelaskan variasi variabel belanja daerah amat terbatas (Ghozali, 2011:97). Hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai koefisien determinasi disajikan pada tabel 10.

Tabel 10
Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .933 ^a | .870 | .860 | 435703124288.21045 |

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

Sumber : Output SPSS

Berdasar tabel 10 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,870 atau 87,0% artinya variabilitas variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel PAD dan DAU sebesar 87,0%, sedangkan sisanya sebesar 13,0%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel DAU dan PAD secara bersama-sama terhadap variabel belanja daerah. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2012:257):

a. Merumuskan hipotesis statistik

Ho : $b_1 = b_2 = 0$; variabel DAU dan PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel belanja daerah

Ha : $b_1 = b_2 \neq 0$; variabel DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah.

b. Menentukan nilai signifikansi yaitu sebesar 5% atau 0,05.

c. Menghitung nilai F hitung

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai F yang terlihat pada ANOVA tersaji pada tabel 11.

Tabel 11
Hasil Uji F
ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|---------------------|----|---------------------|--------|-------------------|
| Regression | 3433545370072218400 | 2 | 1716772685036109200 | 90.434 | .000 ^b |
| 1 Residual | 512560473789171000 | 27 | 18983721251450778 | | |
| Total | 3946105843861389000 | 29 | | | |

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU

Sumber : Hasil Output SPSS

d. Kriteria pengujian uji F adalah:

- 1). Jika Sig. > (α) 0,05, maka model regresi yang dihasilkan tidak baik (tidak layak) untuk digunakan pada analisis selanjutnya.
- 2). Jika Sig. < (α) 0,05, maka model regresi yang dihasilkan baik (layak) dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

e. Menarik simpulan

Uji ANOVA menghasilkan nilai F hitung sebesar 90.434 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka dapat disimpulkan bahwa model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan DAU dan PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah terdukung sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan belanja daerah dipengaruhi oleh besarnya Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Afriawati (2012) yang menyatakan DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Belanja Daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan.

Pembahasan

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

Tujuan dari pemberian dana alokasi umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Puspita Sari, 2010).

Darwanto (2007), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik ditegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Puspita Sari (2010) mengemukakan bahwa dana alokasi umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Abdul Halim (2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal yang bertujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum

yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja tidak langsung.

Besar-kecilnya transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), yang termasuk dalam bagian Dana Perimbangan mempengaruhi alokasi belanja langsung. Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan di masa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Namun di sisi lain, transfer yang diterima dari pemerintah pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi (Rahmawati, 2010). PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Puspita Sari, 2010). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat. Pernyataan Friedmen (dalam Bambang Prakosa, 2004) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 2002).

Analisis flypaper effect tahun 2009-2013

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai *Standardized Coefficients* Dana Alokasi Umum sebesar 0,151 sedangkan nilai *Standardized Coefficients* Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,831 nilai *Standardized Coefficients* Pendapatan Asli Daerah (0,831) lebih tinggi dari Dana Alokasi Umum (0,151), sehingga sesuai dengan kriteria terjadinya *flypaper effect* adalah

(1) apabila efek (nilai koefisien) Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada efek Pendapatan Asli Daerah dan keduanya sama-sama signifikan, atau (2) Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan (Maimunah, 2008), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2009-2013 tidak terjadi *flypaper effect* pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur khususnya wilayah Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) . Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Rokhanyah & Nugroho (2011), dimana tidak terjadi *flypaper effect* pada daerah luar Jawa (perbedaan potensi daerah).

Berikut ini adalah kontribusi DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir pengaruh PAD lebih besar terhadap belanja daerah bila dibandingkan dengan pengaruh DAU terhadap belanja daerah. Karena dengan proporsi PAD yang paling tinggi dalam pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota mengindikasikan kalau pemerintah daerah tersebut mampu untuk membiayai segala kewenangannya dalam menjalankan otonomi daerah atau dengan kata lain daerah tersebut bisa mandiri tanpa menggantungkan bantuan dana dari pusat. Tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam memenuhi belanja daerah diukur dari besarnya perbandingan antara PAD sebagai pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dengan DAU sebagai pendapatan dari pihak lain yang mencerminkan kebutuhan fiskal suatu daerah. Apabila angka proporsi antara keduanya menunjukkan hasil yang tinggi dari DAU maka dapat dikatakan terjadi *flypaper effect* dan sebaliknya jika PAD yang lebih tinggi maka tidak terjadi *flypaper effect*.

Tabel 12
Kontribusi DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah
(dalam %)

| DAU | PAD | Belanja Daerah | Kontribusi | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------|
| | | | DAU | PAD |
| 765.885.671.000 | 809.795.526.042 | 3.127.363.165.158 | 24.49 | 25.89 |
| 666.155.936.000 | 284.660.712.000 | 1.371.659.767.000 | 48.57 | 20.75 |
| 502.176.671.000 | 596.256.570.000 | 831.735.044.000 | 60.38 | 71.69 |
| 581.718.829.000 | 713.202.440.000 | 982.407.163.000 | 59.21 | 72.60 |
| 511.324.320.000 | 160.961.188.000 | 1.009.099.863.000 | 50.67 | 15.95 |
| 478.763.360.000 | 344.771.430.000 | 715.577.571.000 | 66.91 | 48.18 |
| 652.532.472.000 | 908.647.775.730 | 3.637.069.260.868 | 17.94 | 24.98 |
| 666.336.274.000 | 2.887.317.070.000 | 1.548.893.545.000 | 43.02 | 186.41 |
| 529.781.802.000 | 628.502.310.000 | 806.001.596.000 | 65.73 | 77.98 |
| 606.700.000.000 | 940.660.550.000 | 942.039.572.000 | 64.40 | 99.85 |
| 513.481.870.000 | 168.302.821.000 | 1.043.302.834.000 | 49.22 | 16.13 |
| 497.593.900.000 | 353.555.330.000 | 755.125.158.000 | 65.90 | 46.82 |
| 679.450.127.000 | 1.886.514.301.580 | 3.753.710.413.890 | 18.10 | 50.26 |
| 758.701.153.000 | 484.313.737.000 | 1.828.757.388.000 | 41.49 | 26.48 |
| 598.664.725.000 | 1.087.094.040.000 | 1.058.760.365.000 | 56.54 | 102.68 |
| 679.813.150.000 | 995.456.290.000 | 1.287.973.838.000 | 52.78 | 77.29 |
| 561.081.899.000 | 274.033.173.000 | 1.272.966.419.000 | 44.08 | 21.53 |
| 565.621.082.000 | 650.394.010.000 | 1.109.022.544.000 | 51.00 | 58.65 |
| 1.061.625.528.000 | 2.279.613.848.832 | 4.299.150.223.080 | 24.69 | 53.02 |
| 974.570.533.000 | 669.617.557.000 | 2.238.524.286.000 | 43.54 | 29.91 |
| 733.782.205.000 | 1.670.546.380.000 | 1.253.042.805.000 | 58.56 | 133.32 |
| 832.015.926.000 | 1.292.847.330.000 | 1.473.747.395.000 | 56.46 | 87.73 |
| 711.868.321.000 | 427.588.706.000 | 1.451.130.801.000 | 49.06 | 29.47 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|
| 700.513.200.000 | 802.537.090.000 | 1.220.089.508.000 | 57.41 | 65.78 |
| 1.160.025.693.000 | 2.791.580.050.000 | 5.057.279.664.345 | 22.94 | 55.20 |
| 1.104.580.340.000 | 721.794.682.000 | 2.581.879.644.000 | 42.78 | 27.96 |
| 832.266.682.000 | 1.902.362.210.000 | 1.326.988.428.000 | 62.72 | 143.36 |
| 958.344.988.000 | 1.246.056.550.000 | 1.550.103.022.000 | 61.82 | 80.39 |
| 804.903.511.000 | 423.216.536.000 | 1.810.425.747.000 | 44.46 | 23.38 |
| 778.024.112.000 | 832.494.410.000 | 1.370.899.004.000 | 56.75 | 60.73 |
| Rata-rata | | | 48.72 | 61.14 |

Sumber Data: BPS Jawa Timur 2009-2013 (diolah)

Berdasar Tabel 12 dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi atau pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah selama 5 tahun terakhir 2009-2013 lebih besarnya pengaruh PAD terhadap belanja daerah daripada pengaruh DAU terhadap belanja daerah dengan rata-rata kontribusi PAD sebesar 61.14% > kontribusi DAU sebesar 48.72% , sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi *flypaper effect*

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *flypaper effect* Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki DAU rendah maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin rendah.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.
3. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai *Standardized Coefficients* Dana Alokasi Umum sebesar 0,273, sedangkan nilai *Standardized Coefficients* Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,703, nilai *Standardized Coefficients* Pendapatan Asli Daerah (0,703) lebih tinggi dari Dana Alokasi Umum (0,273), sehingga sesuai tidak *flypaper effect*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga Pemerintah Daerah agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih. Dan mengambil sampel selain kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy & Halim, Abdul. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.). *Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003*
- Afrizawati. 2012. Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol. 2 No. 1. Palembang*
- Anonim (2009). *Birokrasi dalam Era Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Realisasi Penerimaan Kabupaten/Kota Se-Gerbangkertasusila. Januari. BPS Jawa Timur. Surabaya
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba 4: Jakarta
- Gamkhar, S. dan W.E Oates (1996). "Asymmetries in the Response to Increases and Decreases in Intergovernmental Grants: Some Empirical Findings". *National Tax Journal*. 49(4): 501-12.
- Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Halim, Abdul (2001). Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress" (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4): 346-357
- Hastutu, Indhi. 2011. Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Satuan Asli Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Kartikasari, Rofiqoh. 2014. Pengaruh Tingkat Kemandirian Dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah, Tingkat Kemandirian Dalam Mengelola Potensi Daerah dan SiLPA terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP: Semarang.
- Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- Listiorini. 2012. Fenomena Flypaper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol 4 No 2*
- Litvack. 1999. "Private Demands for Public Goods". *American Economic Review*, 63 (3), Oktober: 280-96
- Maimunah, Mutiara. (2006). Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Panggabean, Henri Edison H. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta

- Saputri, Marissa Ayu. 2014. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP. Semarang.
- Shah, A. 1997. "The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies". Policy and Paper Series, No 23, The World Bank, Washington, DC.
- Triwidodo, Pambudi. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165. Jakarta.
- Widodo, Tri Pambudi. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali (Studi Pada Kabupaten/Kota di Bali). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta